

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. Z., & Siddiq, A. (2015). *Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 2, 63–76.
- Adikresna, P. R., & Budisusanto, Y. (2014). *Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari)*. Jurnal Geoid, Volume 9, 195-200
- Amhar, F., Patmasari, T., & Kencana, A. (2001). *Aspek-Aspek Pemetaan Batas Wilayah, Sebuah Tinjauan Komprehensif*. Jurnal Geo-Informatika, Volume 8, 1-10
- Asadi. (2016). *Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi Dengan Pendekatan Geospasial*. Jurnal Borneo Administrator, Volume 12, 131-147.
- Aswandi. (2018). *Personal Interview*. Tanggal 5 Februari 2018, Batu Songgan
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Riau (2017). *Sejarah Penetapan Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling*.
- Chapin, M., Lamb, Z., & Threlkeld, B. (2005). *Mapping Indigenous Lands*. The Annual Review of Anthropology, Volume 34, 619-638.
- Dale, P., & McLaughlin, J. (1999). *Land Administration*. Oxford Press, New York, USA
- Dijk, R. Van. (1971). *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Edisi Kesatu). Bandung: Penerbit; Sumur Bandung.
- Haba, J. (2010). *Realitas Masyarakat Adat di Indoensia (Sebuah Refleksi)*. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12, 256–276.
- Hendriatiningsih, D. (2008). *Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*. Jurnal Sosioteknologi, Volume 15, 517–528.
- Jing, Y. (2011). *Assessing Larsi-Integrated Participation Procedure For Urban Adjudication In China*. University Of Twente.
- Jusman. (2018). *Personal Interview*. Tanggal 5 Februari 2018, Batu Songgan
- Lahasim. (2018). *Personal Interview*. Tanggal 5 Februari 2018, Batu Songgan
- Malik, A., Sudarsono, B., & Awaludin, M. (2015). *Penentuan Batas Daerah Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung dan Teluk Bayur di Kabupaten Berau Dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus : Kawasan Perkotaan Kabupaten Berau)*. Jurnal Geodesi Undip, Volume 4, 51-60.
- Manarisip, M. (2012). *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*. Jurnal Lex Crimen, Volume 1, 24-40.
- Mazurek, R. R. de S. (2016). *Mapping in the Oiapoque Indigenous Territories*. Revue D'ethnoécologie, Volume 9.
- Mumbone, M. (2015). *Innovations In Boundary Mapping: Namibia, Customary Land and UAV's*. University Of Twente.
- Muslim, F. H., Sudarsono, B., & Putra Wijaya, A. (2017). *Verifikasi Letak Segmen Batas Indikatif Berdasarkan Aspek Teknis dan Non Teknis (Studi Kasus : Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*. Jurnal Geodesi Undip, Volume 6, 128-137.
- Nadeak, H., Y Dalla, A., Nuryadin, D., & Hadi, A. (2015). *Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

- Jurnal Bina Praja, Volume 7, 239-250.
- Niendyawaty, & Hidayatno, L. (2015). *Aplikasi Data Inderaja dan SIG Untuk Percepatan Penetapan Batas Administrasi (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*. Majalah Ilmiah Globe, Volume 17, 89-95.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang *Hak Tanah Ulayat*.
- Pramono, AH (2014). *Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat*. Jurnal Wacana, Volume 33, 199-233.
- Republik Indonesia, (1999). *Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 167. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2004). *Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 1252. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Renjaan dkk, M. J. (2013). *Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara*. Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 11, 23-29.
- Republik Indonesia, (2014). *Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 951. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Riadi, Bambang., Makmuriyanto, A. (2014). *Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan Secara Kartometris*. Majalah Ilmiah Globe, Volume, 109–116.
- Riadi, Bambang. (2015). *Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris*. Social Science Education Journal, Volume 2, 92–100.
- Republik Indonesia, 2015. *Peraturan BIG Nomor 5 tahun 2015 tentang Standar Ketelitian Peta*.
- Riadi, Bambang. (2016). *Kajian Produk Peta Desa Badan Informasi Geospasial*. Bogor. Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI, Bogor Proceeding, 127-137
- Republik Indonesia, (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 1038. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia, (2016). *Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 568. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2016. *Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa*
- Riadi, Bambang., & Soleman, MK. (2011). *Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo*. Majalah Ilmiah Globe, Volume 13, 41-49.
- Rustiadi, E., & Junaidi. (2011). *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2017. *Peraturan BIG Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat*.
- Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. (n.d.). *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24.
- Siscawati, M. (2014). *Masyarakat Adat dan Perebutan Kekuasaan Hutan*. Jurnal Transformasi Sosial, Volume, 3-24.
- Sugiswati, B. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Indonesia*. Journal Perspektif, Volume XVII, 31–43.
- Sukma, A. I., Sudarsono, B., & Janu, F. (2017). *Verifikasi Penarikan Garis Batas Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur Sesuai Dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Menggunakan Metode Kartometrik*. Jurnal Geodesi Undip, Volume 6, 67-76.
- Sumaryo. (2015). *Asesmen Peran Informasi Geospasial Dalam Proses Boundary Making Dan Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Suparmantono. (2018). *Personal Interview*. Tanggal 4 Februari 2018, Lipat Kain Thontowi, J. (2013). *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 20, 21-36.
- Tuladhar, A. M. (1996). *Spatial Cadastral Boundary Concepts and Uncertainty in Parcel Based Information System*. Journal International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume XXXI, 890–893.
- Wulansari., C. Dewi. (2016). *Hukum Adat di Indonesia*. (A. Gunarsa, Ed.) (Cetakan Ke). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zevenbergen, J. (2004). *A Systems Approach to Land Registration and Cadastre*. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Volume 1